

STRATEGI PENGUATAN *MICROFINANCE* SYARIAH BERBASIS EKONOMI KELEMBAGAAN

Darwanto

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro,
darwantomsiugm@yahoo.com*

Abstract

The purpose of this study is to obtain an overview of the sharia microfinance issues, sharia microfinance solutions to solve problems, and institutions strategies for strengthening sharia microfinance. The method used in this study is a qualitative analysis method using the tool Analytical Network Process (ANP) is used to find the priority of problems, solutions and strategies for improvement of sharia microfinance institutions. The results of studies suggest that the improvement in sharia microfinance institutions have 4 aspects, those are the problems of the human resource aspects (SDI), infrastructure aspects, market aspects, and management aspects. Aspect of the priority issues in the sharia microfinance institutional improvement is a human resources (SDI), while the improvement solution of sharia microfinance institutional is an aspect of human resources (SDI) as well. Then the strategy which becomes a priority in the improvement of sharia microfinance institutions is the optimization of the board of sharia (DPS)

Keywords: Sharia Microfinance, Institution Economics, Analytical Network Process (ANP)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran permasalahan microfinance syariah, solusi dari permasalahan microfinance syariah, dan strategi kelembagaan untuk penguatan microfinance syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alat Analytical Network Process (ANP) yang digunakan untuk menemukan prioritas dari permasalahan, solusi serta strategi untuk penguatan kelembagaan microfinance syariah. Hasil penelitian menunjukkan penguatan kelembagaan microfinance syariah mempunyai 4 aspek menjadi permasalahan yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar, dan aspek manajemen. Aspek yang menjadi prioritas permasalahan dalam penguatan kelembagaan microfinance syariah adalah aspek sumber daya insani (SDI), sedangkan prioritas solusi peningkatan kelembagaan microfinance syariah adalah aspek sumber daya insani (SDI) juga. Kemudian strategi yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan microfinance syariah adalah optimalisasi dewan pengurus syariah (DPS).

Kata Kunci: Microfinance Syariah, Ekonomi Kelembagaan, Analytical Network Process (ANP)

Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro kini telah menjadi wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode alternatif untuk mengatasi masalah dalam perekonomian terutama masalah kemiskinan. Pemerintah diberbagai negara berkembang kini telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro mempunyai peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam mendukung usaha mikro. Peran penting juga dialami oleh lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik hampir sama dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. Hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namun demikian, UMKM juga memiliki permasalahan diantaranya distribusi produk-produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, serta akses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnya perbankan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan formal menyebabkan banyak UMKM bergantung pada sumber-sumber pembiayaan informal. Hal ini karena syarat dan jumlah pinjaman tidak serumit lembaga keuangan formal, oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal disebut-sebut sesuai dengan kebutuhan UKM.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah. Lima belas tahun terakhir, LKMS terbilang mengalami perkembangan yang pesat, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnya di Indonesia. Lembaga keuangan yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas dalam wujud *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini, telah mengalami perkembangan sejak tahun 1995. Pada akhirnya mendapatkan

momentum kebangkitan disaat krisis melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang saat itu dunia lembaga perbankan di Indonesia mengalami krisis kepercayaan. Munculnya BMT menjadi solusi pengusaha kecil menengah kebawah dalam mendapatkan bantuan permodalan, dimana beratnya akses untuk mendapatkan sokongan dana dari lembaga keuangan konvensional.

Yuli (2008) menjelaskan bahwa manfaat dari pembentukan LKMS dapat terasa bagi kepentingan pembangunan ekonomi makro. Adapun manfaat LKMS bagi pembangunan makro adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat
2. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha
3. Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral (jaminan) dan terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya.
4. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha
5. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin
6. Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas
7. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah

Asosiasi BMT Jawa Tengah merilis bahwa pada tahun 2011 terdapat 360 BMT yang tersebar di Jawa Tengah, dan yang telah resmi menjadi anggota asosiasi BMT Jawa Tengah sebanyak 119 unit. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah umur berdirinya BMT yang masih kurang dari 2 tahun dan ketidakmauan dari BMT tersebut untuk bergabung menjadi anggota asosiasi BMT Jawa Tengah.

Tabel 1 Perkembangan Anggota Asosiasi BMT Jateng Pada tahun 2011

| Bulan | Jumlah Anggota |
|--------------|-----------------------|
| Januari | 72 |
| Februari | 72 |
| Maret | 82 |
| April | 91 |
| Mei | 111 |
| Juni | 114 |
| Juli | 119 |

Sumber: Asosiasi BMT Jateng 2011

Tabel 1 menunjukkan perkembangan anggota asosiasi BMT Jawa Tengah mengalami tren positif, di mana rata-rata perbulan terdapat 5 unit BMT yang mendaftarkan diri pada asosiasi BMT Jawa Tengah. Di samping mulai dewasanya manajemen dari BMT itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang disyaratkan oleh perbankan bahwasannya setiap BMT yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank harus menyertakan rekomendasi dari asosiasi BMT kota/kabupaten setempat (PUSKOPSYAH-BMT JATENG).

Lembaga keuangan mikro syariah dalam operasionalnya sering menghadapi permasalahan atau tantangan terkait kemampuan sumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur). Studi awal melalui *indepth interveiw* dan *focus group discussion* (FGD) menunjukkan paling tidak empat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi *microfinance* syariah, yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen. Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumber daya insani yang mengalami dualisme intelektual antara para ulama dengan para sarjana muslim yang disebabkan oleh dikotomi sistem pendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastruktur berkaitan fasilitas/infrastruktur dalam *microfinance* syariah. Aspek pasar berkaitan dengan persaingan dan pemahaman masyarakat terhadap *microfinance* syariah. Serta aspek manajemen yaitu aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum serta sistem pengawasan atau pembinaan. Aspek-aspek tersebut selanjutnya diidentifikasi

berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masing sub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan *microfinance* syariah.

Lembaga Keuangan Mikro

Definisi yang dipakai dalam *Microcredit summit* (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

LKM di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu LKM yang sifatnya formal dan Informal. LKM formal dalam bentuk Bank terdiri dari BKD, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit, sementara LKM formal non Bank mencakup Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dan Koperasi (KSP & KUD). LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan lembaga swadaya masyarakat (KSM & LSM), *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), dan bentuk kelompok lainnya. LKM informal lebih mengena kepada pelaku UMK karena sifatnya yang fleksibel dibandingkan dengan LKM formal.

Chotim dan Handayani (2001) menyebutkan bahwa LKM mempunyai karakter khusus, yaitu:

1. Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman.
2. Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.

Sudarsono (2008) mendefinisikan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang ada antara lain *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*.

Baitul maal dapat diartikan sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* dapat diartikan sebagai pengembangan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Adapun peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2008). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Wardoyo dan Hendro Prabowo (2003) melakukan penelitian tentang kinerja lembaga keuangan mikro dalam upaya untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jabodetabek dengan memasukkan variabel seperti: pencapaian hasil *target group*, permodalan, *capacity building*, dan permasalahannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja LKM diduga kuat dipengaruhi oleh sikap mental dari pelaku UMKM itu sendiri. Dalam penelitian lain yang dilakukan Tsalistia (2010) tentang pelaksanaan program *Microfinance* Syariah berbasis Masyarakat (Misykat) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro di Bogor dengan melihat dari capaian indikator keberhasilan program dan menganalisis strategi yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan program misykat di Bogor berdasarkan skala prioritas. Hasil penelitian secara deskriptif menggambarkan profil model misykat di Bandung sebagai pusat kepengurusan dan efektifitas keberhasilan yang cukup berhasil dalam program misykat di Bogor.

Institutional Economics

Institutional Economics atau ekonomi kelembagaan merupakan sebuah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Didalam perkembangannya, ilmu ekonomi kelembagaan dibagi menjadi ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics/OIE*) dan ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics / NIE*).

Teori OIE merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak memiliki dasar ekonomi *orthodox*, ekonomi klasik, maupun ekonomi neo-klasik. Mereka menentang pemikiran neo-klasikal karena dianggap tidak memasukkan sisi-sisi humanistik dalam pendekatannya (North, 1990). Mereka mengatakan bahwa teori OIE bukan lembaga secara fisik melainkan perilaku ekonomi yang didorong oleh pertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu (Furubotn dan Richter, 2000 dan North, 1990).

Teori NIE menggambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. Setiap pelaku ekonomi tidak dapat keluar bebas memasuki pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sama tersebut menimbulkan konsekuensi biaya transaksi. Semakin tidak sempurna informasi, maka semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan (Furubotn and Richter, 2000).

Relevansi penguatan microfinance syariah dengan ekonomi kelembagaan

Konsep kelembagaan dalam pengelolaan *microfinance* syariah terkait dengan aturan atau tata kelola operasional *microfinance* syariah. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan operasional *microfinance* syariah akan memberikan kontribusi apakah lembaga keuangan ini akan efisien atau tidak.

Aspek selain aturan adalah instansi atau lembaga itu sendiri. Lembaga dalam konteks *microfinance* syariah dapat berupa *microfinance* syariah yang mempunyai otoritas dalam operasional *microfinance* syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau

Dewan Syariah Nasional (DSN) serta asosiasi atau organisasi *microfinance* syariah yang dapat mendukung operasional dan daya saing *microfinance* syariah.

Selanjutnya aspek yang punya peran penting dalam ekonomi kelembagaan adalah modal sosial. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi kerjasama yang saling menguntungkan (Yustika, 2006:194) *microfinance* syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan syariat islam dianggap sebagai lembaga bisnis yang dijalankan dengan jujur dan mempunyai reputasi bagus. Oleh karena itu *microfinance* syariah mempunyai modal yang cukup bagus untuk dipercaya oleh masyarakat, sehingga mempunyai potensi untuk berkembang lebih cepat.

Arsyad (2005) melakukan penelitian tentang kelembagaan lembaga *microfinance* khususnya LPD di Bali dengan judul *An Assesment of Microfinance Institution Performance: The Importance of Institutional Environment*. Hasil penelitian tersebut merumuskan indikator kinerja kelembagaan yang baik dipengaruhi oleh faktor informal khususnya nilai kebudayaan dan norma yang berlaku pada masyarakat Bali umumnya. Penelitian lain juga dilakukan Aam dan Muh. Jakarsih (2012) mengkaji tentang penguraian masalah pengembangan *Baitul Maal Wat-Tamwiil* (BMT) di Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengembangan BMT di Indonesia. Kemudian juga merumuskan beberapa solusi dalam memecahkan masalah dalam pengembangan BMT di Indonesia. Selain itu, penelitian ini merumuskan strategi *linkage* program BMT-BPRS-Bank Umum Syariah serta optimalisasi peran pemerintah sebagai prioritas strategi dalam pengembangan *Baitul Maal Wat-Tamwiil* (BMT) di Indonesia.

Metode penelitian

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodologi *Analytical Network Process* (ANP) yang menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara (*in-depth interview*) dengan pakar, praktisi dan

regulator, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan selanjutnya dengan para responden. Data yang diperoleh kemudian siap diolah dengan *software super decision* dengan memasukkan variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

Populasi dan Sampel

Responden pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampel* dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebut mengenai permasalahan dalam peningkatan kelembagaan *microfinance* syariah di Kota Semarang. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pakar, praktisi, nasabah dan regulator yang memiliki kompetensi di dalam bidang *microfinance* syariah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari akademisi, pemilik BMT, pegawai BMT, Nasabah BMT dan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Kuesioner ANP disajikan dalam bentuk *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui perbandingan besarnya pengaruh dan seberapa besar perbedaannya. Skala yang digunakan adalah skala numerik 1-9 untuk menerjemahkan penilaian verbal.

Tabel 2. Perbandingan Skala Verbal dan Numerik

| Definition | Intensity of Importance |
|---|--------------------------------|
| <i>Equal Importance</i> | 1 |
| <i>Weak</i> | 2 |
| <i>Moderate Importance</i> | 3 |
| <i>Moderat Plus</i> | 4 |
| <i>Strong Importance</i> | 5 |
| <i>Strong Plus</i> | 6 |
| <i>Very Strong or Demonstrated Importance</i> | 7 |
| <i>Very, very Strong</i> | 8 |
| <i>Extreme Importance</i> | 9 |

Sumber: Saaty (2006)

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode *Analytical Network Process* (ANP) yang merupakan metode yang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam,

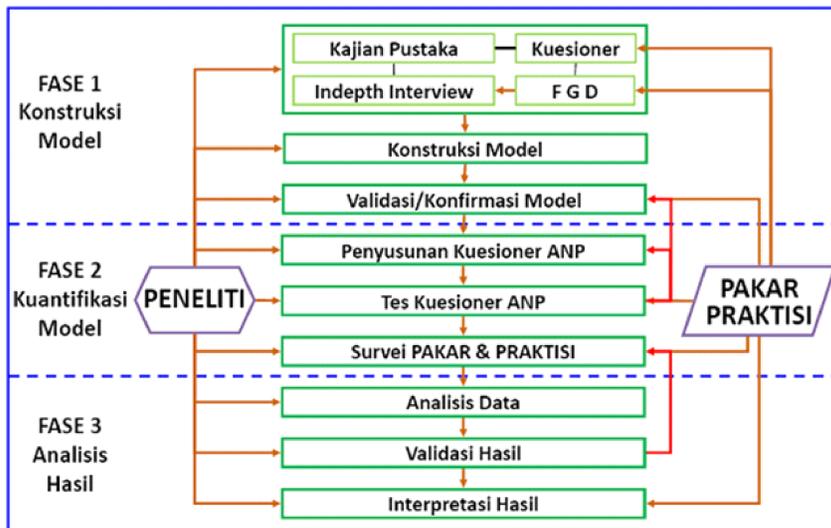
seperti pengambilan keputusan, *forecasting*, evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.

Tabapan Penelitian ANP

Tahapan pada metode ANP untuk penguatan kelembagaan *microfinance* syariah antara lain:

a. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi *microfinance* syariah serta melalui *indepth interview* atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.



Gambar 1. Tahapan Penelitian ANP

Sumber: Ascarya (2010)

b. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana di-

antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.

c. Sintesis dan Analisis

Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean*. Pertanyaan berupa perbandingan (*pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu

Rater Agreement

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W = 1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Untuk menghitung *Kendall's (W)*, yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya (Ascarya, 2010)

Landasan ANP

ANP memiliki tiga aksioma yang menjadi landasan teorinya: 1) *Resiprokal*. Aksioma ini menyatakan bahwa jika $P_C(E_A, E_B)$ adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $P_C(E_B, E_A) = 1/P_C(E_A, E_B)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A. 2) *Homogenitas*; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan. 3) *Prioritas*; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan

skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif. 4) *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Analisis

Permasalahan dalam hal penguatan *microfinance* syariah di kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen. *Cluster-cluster* secara keseluruhan dikelompokkan menjadi *cluster* permasalahan, solusi dan strategi.

- a. Permasalahan Sumber Daya Insani (SDI) yaitu disebabkan oleh dikotomi antara sistem pendidikan syariah dan pendidikan umum yang menyebabkan adanya dualisme intelektual. Selain itu juga masyarakat pada umumnya belum *familiar* dengan praktik *Microfinance* Syariah. Permasalahan SDI ini dibagi menjadi tiga sub yaitu: 1) Lemahnya pemahaman praktisi *microfinance* syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah. Pengurus *microfinance* syariah masih banyak yang belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Sehingga, belum terpenuhinya sumber daya insani yang berkualitas di bidang ekonomi syariah mengakibatkan praktik *microfinance* syariah sering kali menyimpang dari prinsip syariah. 2) Secara umum sumber daya insani yang dimiliki *microfinance* syariah relatif belum profesional layaknya lembaga keuangan seperti perbankan yang relatif besar. 3) Jumlah SDI di *microfinance* syariah masih terbatas sehingga kurang maksimal dalam pelayanan dalam bekerja. Kekurangan menyebabkan perekrutan karyawan yang kurang kompetitif sehingga tidak dapat mendapatkan karyawan yang berkualitas.
- b. Permasalahan infrastruktur yaitu yang berkaitan fasilitas/ infrastruktur. Permasalahan infrastruktur terbagi menjadi 3 sub yaitu: 1) Kurang memadainya fasilitas/ infrastruktur Teknologi Informasi (IT), padahal hal tersebut merupakan salah satu prasyarat penting sebuah lembaga keuangan. 2) Inovasi di

- bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki *microfinance* syariah masih sangat lemah.
- 3) Koordinasi antar lembaga *microfinance* syariah masih lemah yang menyebabkan kinerja dari lembaga *microfinance* syariah belum maksimal.
- c. Permasalahan pasar yaitu yang berkaitan dengan persaingan dan pemahaman serta minat masyarakat. Permasalahan pasar terbagi menjadi 3 sub yaitu: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga *microfinance* syariah terutama kemanfaatannya bagi masyarakat. 2) Tingkat kepercayaan nasabah masih rendah, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk memakai jasa keuangan yang sudah umum. 3) Permasalahan dalam bagian ini anatara lain persaingan, baik persaingan antar *microfinance* syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Namun, pada praktiknya, persaingan yang paling ketat adalah antara *microfinance* syariah dengan perbankan syariah yang juga menyediakan layanan mikro.
- (1) Permasalahan manajemen yaitu yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan. Permasalahan manajemen meliputi 3 sub yaitu: 1) Manajerial lembaga *microfinance* syariah masih lemah yang berimbas pada kinerja lembaga *microfinance* syariah. 2) Manajemen *funding*/penghimpunan dana belum optimal karena sumber dana yang ada masih terbatas dan kecil. 3) Pelayanan kurang maksimal yang mengakibatkan masyarakat kurang berminat untuk memakai jasa *microfinance* syariah.

Identifikasi Solusi

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam hal penguatan *microfinance* syariah antara lain:

a. Solusi SDI

- 1) *Training* intensif untuk SDI dan penggerak *microfinance* syariah, sehingga SDI mempunyai kelebihan dan kemampuan yang handal dalam menjalankan *microfinance* syariah.

- 2) Seleksi komprehensif atas SDI *microfinance* syariah sehingga menghasilkan SDI yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang *microfinance* syariah.
 - 3) Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah khususnya untuk sumber daya insani yang berkompeten dalam *microfinance* syariah.
- b. Solusi Infrastruktur
- 1) Melakukan *upgrading system*/jaringan melalui pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi serta memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadi lembaga *microfinance* syariah.
 - 2) Menciptakan produk dan layanan yang inovatif dengan cara mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya agar bisa merebut pasar/menarik minat masyarakat untuk memakai jasa lembaga *microfinance* syariah, misalnya produk yang akomodatif terhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam dunia perbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).
 - 3) Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan lembaga *microfinance* syariah serta untuk wadah *sharing* permasalahan atau strategi dalam memperkuat lembaga *microfinance* syariah.
- c. Solusi Pasar
- 1) Edukasi masyarakat melalui beberapa forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) terkait dengan produk-produk dan keberadaan *microfinance* syariah sehingga masyarakat diharapkan bisa mengenal lebih dalam lembaga *microfinance* syariah serta memanfaatkan jasanya.
 - 2) Promosi produk atau keberadaan lembaga *microfinance* syariah melalui berbagai media (media koran, selebaran/*leaflet*, ataupun media online).
 - 3) Pemberian *Reward* yaitu memberikan penghargaan atas kesetiaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga *microfinance* syariah, misalnya berupa kesempatan untuk ibadah umrah.

d. Solusi Manajemen

- 1) Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen melalui beberapa pelatihan manajerial seperti aspek ekonomi dan manajemen keuangannya sehingga mampu membawa lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih berkembang.
- 2) Memperluas cakupan sumber dana dengan cara memperoleh kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai kemauan untuk menaruh dananya pada lembaga *microfinance* syariah yang mempunyai prinsip amanah (*trust*), contohnya melalui ketokohan dalam masyarakat.
- 3) Peningkatan SOP pelayanan diharapkan akan menjadikan lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih tertata dan teratur.

Identifikasi Strategi

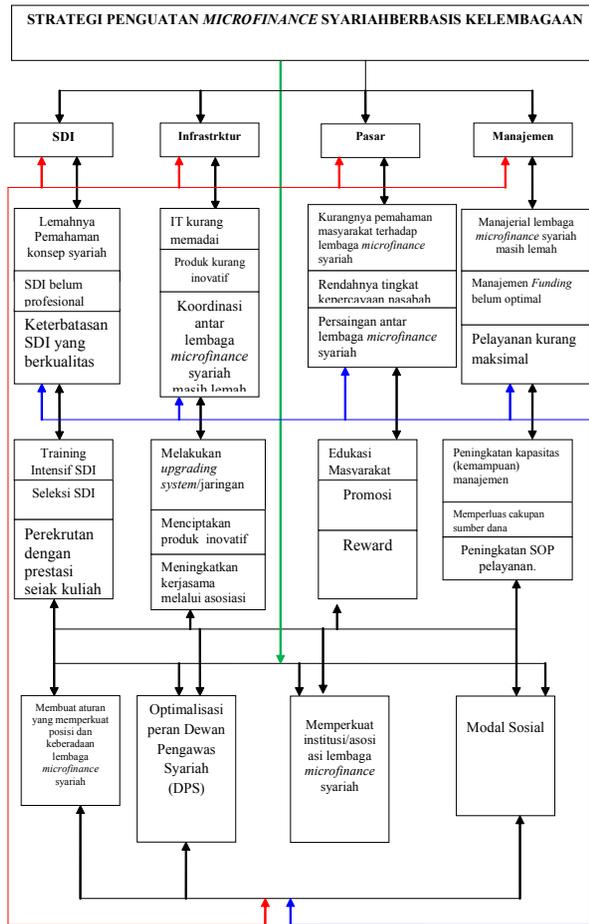
Identifikasi masalah dan solusi yang dilakukan dalam studi ini menghasilkan strategi dalam penguatan *microfinance* syariah yaitu:

- 1) Membuat aturan yang memperkuat posisi dan keberadaan lembaga *microfinance* syariah seperti adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur sehingga dalam melaksanakan kegiatannya lembaga *microfinance* syariah tidak terkendala pada hal-hal yang membatasi atau menghalanginya.
- 2) Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui peningkatan pengawasan terhadap lembaga *microfinance* syariah serta lebih *intens* dalam memberikan masukan dan saran kepada direksi atau pengurus lembaga *microfinance* syariah .
- 3) Memperkuat institusi/asosiasi lembaga *microfinance* syariah salah satunya dengan membentuk himpunan di masing-masing kabupaten atau kota sehingga mudah untuk mengkoordinasikan anggotanya.
- 4) Modal sosial yaitu berdasarkan banyaknya masyarakat pemeluk agama islam atau kerjasama dengan ormas Islam Indonesia. Implementasinya dengan membangun kepercayaan masyarakat tentang prinsip lembaga *microfinance* syariah yang amanah dan

islami (sesuai syar'i).

Jaringan ANP

Hasil identifikasi masalah dan solusi tersebut, selanjutnya dibuat jaringan struktur ANP atas masalah penguatan *microfinance* syariah di kota Semarang seperti berikut ini.



Hasil ANP

Pairwise comparison

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner selanjutnya diolah menggunakan *software Super Decision 2.0.8* dan *Microsoft Excel 2007*. Berikut hasil olah datanya:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Olahan ANP

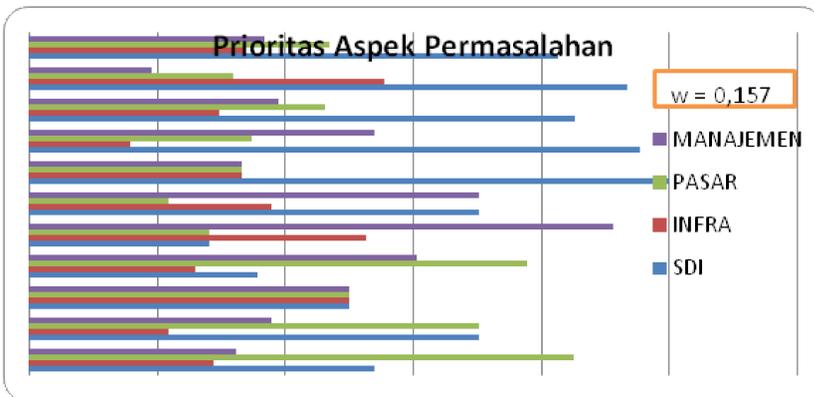
| ASPEK (Permasalahan) | KETERANGAN | |
|---|------------|----------------------|
| | NR | Responden Ranking |
| SDI | 0,413 | 1 |
| INFRASTRUKTUR | 0,168 | 4 |
| PASAR | 0,234 | 2 |
| MANAJEMEN | 0,183 | 3 |
| PERMASALAHAN ASPEK SDI | | |
| Lemahnya pemahaman konsep/prinsip syariah | 0,372 | 2 |
| SDI belum profesional | 0,386 | 1 |
| Keterbatasan SDI yang berkualitas | 0,241 | 3 |
| PERMASALAHAN ASPEK INFRASTRUKTUR | | |
| IT kurang memadai | 0,457 | 1 |
| Produk kurang inovatif | 0,283 | 2 |
| Koordinasi antar lembaga <i>microfinance</i> syariah masih lemah | 0,258 | 3 |
| PERMASALAHAN ASPEK PASAR | | |
| Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga <i>microfinance</i> syariah | 0,493 | 1 |
| Rendahnya tingkat kepercayaan nasabah | 0,242 | 3 |
| Persaingan antar lembaga <i>microfinance</i> syariah | 0,263 | 2 |
| PERMASALAHAN ASPEK MANAJEMEN | | |
| Manajerial lembaga <i>microfinance</i> syariah masih lemah | | |
| | 0,390 | 1 |
| Manajemen <i>Funding</i> belum optimal | 0,370 | 2 |
| Pelayanan kurang maksimal | 0,238 | 3 |
| ASPEK (solusi) | | |
| SDI | 0,396 | 1 |
| INFRASTRUKTUR | 0,250 | 2 |
| PASAR | 0,183 | 3 |
| MANAJEMEN | 0,169 | 4 |
| SOLUSI ASPEK SDI | | |
| Training intensif untuk SDI dan penggerak <i>microfinance</i> syariah; | 0,466 | 1 |
| Seleksi komprehensif atas SDI <i>microfinance</i> syariah; | 0,307 | 2 |
| Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah | 0,226 | 3 |
| SOLUSI ASPEK INFRASTRUKTUR | | |
| Melakukan <i>upgrading system</i> /jaringan | 0,443 | 1 |
| Menciptakan produk dan layanan yang inovatif | 0,294 | 2 |
| Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi | 0,262 | 3 |
| STRATEGI | | |
| Membuat aturan yang memperkuat posisi dan keberadaaan lembaga <i>microfinance</i> syariah | 0,289 | 2 |
| Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) | 0,295 | 1 |
| Memperkuat institusi/asosiasi lembaga <i>microfinance</i> syariah | 0,203 | 4 |
| Modal Sosial | 0,211 | 3 |

NR = Nilai rata-rata
 Sumber: data diolah, 2014

Temuan penelitian ini berdasar perhitungan ANP berbasis hasil wawancara mendalam dan pengisian kuesioner meliputi prioritas permasalahan, prioritas solusi dan prioritas strategi. Penjelasan lebih rinci dari temuan diatas adalah:

1. Prioritas Permasalahan

Permasalahan utama dalam peningkatan kelembagaan dalam lembaga *microfinance* syariah terdiri dari masalah pada aspek SDI, nnfrastruktur, pasar dan manajemen. Hasil ANP menunjukkan prioritas permasalahan yaitu permasalahan aspek SDI.

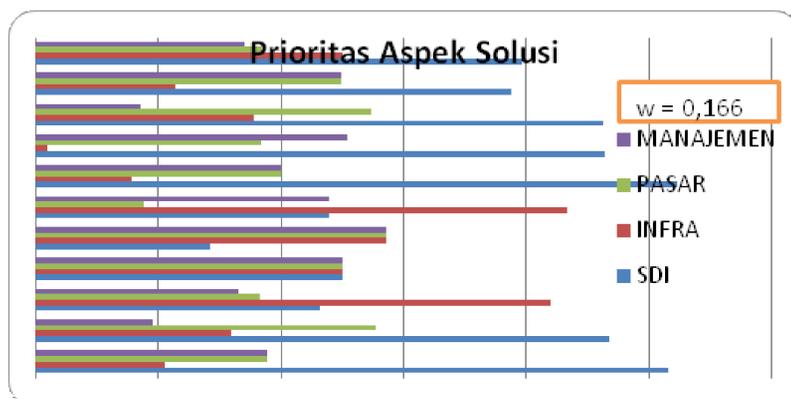


Gambar 2. Prioritas Aspek Permasalahan

Sumber: data diolah, 2014

Adapun prioritas permasalahan tiap sub dari masing masing aspek yaitu pada aspek SDI yang menjadi prioritas masalah yaitu SDI belum profesional. Selanjutnya apek infrastruktur yang menjadi prioritas utama yaitu IT yang kurang memadai. Kemudian aspek pasar yang menjadi prioritas utama yaitu masyarakat kurang paham tentang lembaga *microfinance* syariah. Sedangkan aspek manajemen yang menjadi prioritas utama yaitu manajemen lembaga *microfinance* syariah yang masih lemah.

2. Prioritas Solusi



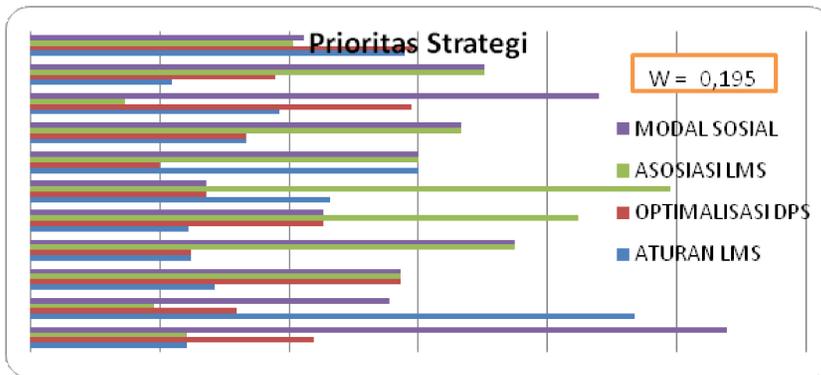
Gambar 3. Prioritas Aspek Solusi

Sumber: data diolah, 2014

Ada beberapa solusi dalam peningkatan kelembagaan dalam lembaga *microfinance* syariah terdiri dari solusi pada aspek SDI, Infrastruktur, pasar dan manajemen. Hasil ANP menunjukkan prioritas solusi yaitu aspek SDI yang sejalan juga dengan permasalahan dalam peningkatan kelembagaan dalam lembaga *microfinance* syariah.

Adapun prioritas solusi tiap sub dari masing-masing aspek yaitu pada aspek SDI yang menjadi prioritas solusi yaitu training SDI. Untuk aspek infrastruktur yang menjadi prioritas utama yaitu *upgrading system*/jaringan. Kemudian aspek pasar yang menjadi prioritas utama yaitu edukasi masyarakat. Sedangkan aspek manajemen yang menjadi prioritas utama yaitu peningkatan kapasitas manajemen.

3. Prioritas Strategi



Gambar 4. Prioritas Strategi

Sumber: data diolah, 2014

Hasil penelitian ANP merumuskan beberapa strategi alternatif dalam penguatan kelembagaan dalam lembaga *microfinance* syariah antara lain yaitu membuat aturan yang memperkuat posisi dan keberadaan lembaga *microfinance* syariah, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), memperkuat institusi/asosiasi lembaga *microfinance* syariah, modal sosial. Hasil ANP menunjukkan strategi yang menjadi prioritas utama yaitu strategi optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui peningkatan pengawasan terhadap lembaga *microfinance* syariah serta lebih intens dalam memberikan masukan dan saran kepada direksi atau pengurus lembaga *microfinance* syariah .

Kesimpulan

Studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1) Ada beberapa aspek yang dijadikan dasar dalam penguatan lembaga *microfinance* syariah yang terdiri dari 4 aspek yaitu; aspek SDI, aspek Infrastruktur, aspek pasar, dan aspek manajemen serta masing-masing aspek mempunyai beberapa spesifik permasalahan dan solusinya. 2) Prioritas utama yang menjadi permasalahan dalam penguatan lembaga *microfinance* syariah konsisten dengan prioritas solusi yaitu aspek SDI. 3) Strategi

kelembagaan dalam penguatan *microfinance* syariah menempatkan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai prioritas. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga *microfinance* syariah serta lebih intens dalam memberikan masukan dan saran kepada direksi atau pengurus lembaga *microfinance* syariah.

Daftar Pustaka

- Aam S. R. dan Muh. Jakarsih 2012. Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) untuk mengurangi Problem Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwill (BMT) di Indonesia. Diakses dari: www.aamslametrusydia.blogspot.com. Pada tanggal 24 juni 2014 pukul 19.52 WIB
- Arsyad, Lincolin, 2005. An Assessment Of Performance And Sustainability Of Microfinance Institutions: A Case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia, Unpublished PhD Thesis, Adelaide, Australia: Flinders University
- Ascarya. 2010. Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. *working paper series* No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Chotim, E.E, dan Handayani, A.D. 2001. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah, *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 6 Nomor 13.
- Erani Yustika, Ahmad. 2006. Ekonomi Kelembagaan, definisi, teori dan strategi. Malang. Bayu media
- Furubotn, EG dan Ritche, R. 2000. Institutions and Economics Theory. Michigan: University of Michigan Press
- North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: University of Cambridge Press
- Saaty, T. & Vargas, L. 1993. 2001. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, RWS Publication, Pittsburgh
- Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi. Ekonisia: Yogyakarta.

- Tsalistia, Aulie. 2010. "Kajian Program Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) sebagai Alternatif Pilihan Program Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid Bogor)". *Jurnal Manajemen IKM*. Vol 5 No 1. pp 12-21.
- Wardoyo. dan Hendro Prabowo. 2003. "Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek". pp 1-7.
- Wijono, Wirjo Wiloejo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 3, No. 3. Jakarta.
- Yuli, Sri Budi Cantika. 2008. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol 6, No 2. pp 12-22.
- <http://www.puskopsyahbmtjateng.com/> diakses tanggal 2 Mei 2014 pukul 21:15